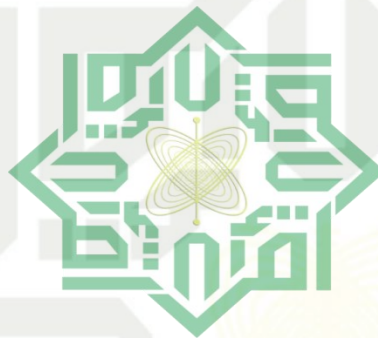




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**EKSEKUSI REKRUTMEN TENAGA KERJA LOKAL PT. JATIM
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN
HILIR NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN
KETENAGAKERJAAN DI KECAMATAN KUBU
BABUSALAM KABUPATEN ROKAN HILIR**



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

EFENDI

NIM. 11627104039

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2021



PERSETUJUAN


Skrripsi dengan judul *"Pelaksanaan Rekrutmen Tenaga Kerja Lokal PT. Jatim Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan Di Kecamatan Kubu Babusalam Kabupaten Rokan Hilir"* yang ditulis oleh:

Nama : EFENDI
 NIM : 11627104039
 Program Studi : ILMU HUKUM

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 27 Dzul Qa'idah 1442 H
 8 Juli 2021 M

Pembimbing Skripsi


Ilham Akbar, S.HI., S.H., M.H.
 NIK. 130217040

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul

PELAKSANAAN REKRUTMEN TENAGA KERJA LOKAL PT. JATIM
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN
KETENAGAKERJAAN DI KECAMATAN KUBU BABUSALAM KABUPATEN
ROKAN HILIR

yang ditulis oleh :

Nama : **EFENDI**
NIM : 11627104039
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 28 Juli 2021
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Daring / Online

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas
Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 29 Juli 2021

TIM PENGUJI MUNAQSAH

Ketua
Dermawan Tia Indrajaya, M. A.

Sekretaris
Jeni Alizon, SH., MH

Penguji I
Nurhidayat, SH., MH

Penguji II
Safrinaldi, SH., MH

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Zulkifli, M. Ag

NIP. 19741006 200501 1 005





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Pelaksanaan rekrutmen tenaga kerja lokal PT. Jatim berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan di Kecamatan Kubu Babusalam Kabupaten Rokan Hilir belum terlaksana dengan baik, karena tenaga kerja yang ada pada PT. Jatim mayoritas adalah tenaga kerja dari luar daerah. Padahal seharusnya tenaga kerja yang ada di PT. Jatim adalah berdasarkan Peraturan Daerah tersebut sekurang-kurangnya 60% tenaga kerja lokal.

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan rekrutmen tenaga kerja lokal PT. Jatim berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan di Kecamatan Kubu Babusalam Kabupaten Rokan Hilir, serta untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan rekrutmen tenaga kerja lokal PT. Jatim di Kecamatan Kubu Babusalam Kabupaten Rokan Hilir.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian lapangan yang menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yakni melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan secara induktif.

Pelaksanaan rekrutmen tenaga kerja lokal PT. Jatim berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan di Kecamatan Kubu Babusalam Kabupaten Rokan Hilir belum terlaksana dengan baik dikarenakan rekrutmen Tenaga Kerja PT. Jatim mayoritas adalah tenaga kerja dari luar daerah. Padahal seharusnya tenaga kerja yang ada di PT. Jatim adalah berdasarkan Peraturan Daerah tersebut sekurang-kurangnya 60% tenaga kerja lokal. Adapaun faktor penghambatnya adalah diantaranya; (i) kurangnya kesadaran hukum; dan (ii) kurangnya kepedulian terhadap tenaga kerja lokal.



1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa, karena berkat limpahan rahmad dan hidayah yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Rekrutmen Tenaga Kerja Lokal PT. Jatim Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan Di Kecamatan Kubu Babusalam Kabupaten Rokan Hilir”** untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari semua pihak dengan berbagai bentuk kontribusi yang diberikan, baik secara moril ataupun materil. Dengan kerendahan dan keulusan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta yaitu ayahanda Ibrahim Nain dan ibunda Samsiah yang telah mencurahkan kasih sayang, cinta dan pengorbanan yang takkan mungkin sanggup penulis balas. Dan tak henti-hentinya mendoakan penulis dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Serta seluruh keluarga yang selalu bersabar dan memberikan semangat serta dukungan moril maupun materil serta do'a.
2. Terimakasih juga kepada saudara penulis yaitu, Abdul Gani. Asmi, Ulyadi, Aboe Khoiri S.Pd, Zulfikar. A. MK, Jasmiyati, A.MK, yang telah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- memberikan nasehat, bimbingan serta doa dan support yang selalu diberikan kepada penulis hingga mencapai pada keberhasilan penulis.
3. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor UIN SUSKA RIAU.
4. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta WD I, WD II, WD III dan Bapak Firdaus, SH. MH, selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum UIN SUSKA Riau yang telah memberikan kesempatan dan pelayanan selama ini kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Ilham Akbar, S.HI., S.H., M.H. selaku pembimbing skripsi penulis yang selama ini membimbing, mengarahkan serta memberikan ilmu dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu Lysa Anggraini, SH., M.H selaku pembimbing akademik (PA) yang telah banyak memberi nasehat dalam menjalani proses perkuliahan.
7. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau yang selama ini telah banyak memberikan berbagai ilmu pengetahuan kepada Penulis
8. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau yang selama ini telah banyak memberikan kemudahan administrasi kepada Penulis.
9. Kepala Perpustakaan beserta pegawainya yang telah memberikan kemudahan kepada penulis untuk mendapatkan bahan dalam penyelesaian penelitian ini.
10. Teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum (HTN) angkatan 2016, terkhusus Kelas Ilmu Hukum E, yang telah bersedia menjadi teman selama empat tahun dalam menimba ilmu bersama-sama.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi materi maupun teknik penulisan, maka untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada penulis dan bagi kepada setiap pembaca, Amin.

Segala usaha dan upaya telah dilakukan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik mungkin. Namun penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan sebagai akibat keterbatasan kemampuan. Oleh karena itu, saran dan kritik serta koreksi dari berbagai pihak demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini akan penulis terima dengan baik. Semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua. Amin, Ya Rabbal Alamin.

Wasalamu'alaikun Wr.Wb.

Pekanbaru, Mei 2021

Penulis,

EFENDI

NIM : 11627104039



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Kecamatan Kubu Babussalam.....	16
1. Gambaran Umum Kecamatan Kubu Babussalam.....	16
2. Monografi Kecamatan Kubu Babussalam	18
3. Luas Daerah Wilayah	19
4. Prasarana Pemerintah Kepenghuluan/Kelurahan Se Kecamatan	20
5. Pemerintah Kecamatan.....	20
6. Prasarana/Sasaran Pengangkutan Dan Komunikasi.....	23
7. Sarana Perekonomian.....	23
8. Jumlah Perusahaan/Usaha.....	24
9. Sarana Sosial Budaya	24
10. Kependudukan.....	29
11. Struktur Organisasi Kecamatan Kubu Babussalam	32
B. PT. Jatim	32
1. Gambaran Umum PT. Jatim.....	32



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Visi Dan Misi PT. Jatim.....	37
3. Struktur Organisasi PT. Jatim	37

BAB III TINJAUAN PUSTAKA

A. Pemerintah Daerah.....	42
1. Pengertian Pemerintahan Daerah	42
2. Asas-Asas Pemerintahan Daerah	43
B. Tenaga Kerja	46
1. Pengertian Tenaga Kerja	46
2. Kesempatan Kerja	51
3. Klasifikasi Tenaga Kerja.....	54
4. Hak Dan Kewajiban Tenaga Kerja	55
C. Mekanisme Rekrutmen Tenaga Kerja PT. Jatim	58
D. Tenaga Kerja Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.....	63

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Rekrutmen Tenaga Kerja Lokal PT. Jatim Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan Di Kecamatan Kubu Babusalam Kabupaten Rokan Hilir.....	63
B. Faktor Penghambat Pelaksanaan Rekrutmen Tenaga Kerja Lokal PT. Jatim Di Kecamatan Kubu Babusalam Kabupaten Rokan Hilir	71

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	76
B. Saran.....	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Table I.1 Populasi dan Sampel.....	11
Tabel II.1 Struktur Organisasi Kecamatan Kubu Babussalam.....	19
Tabel II.2 Struktur Organisasi PT. Jatim	27



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Pasal 1 ayat (8) Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 08 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan tenaga kerja adalah:¹

“Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat”

Adapun yang menjadi tujuan penyelenggaraan ketenagakerjaan adalah

- a. Memberikan pelayanan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan baik dalam hubungan kerja maupun di luar hubungan kerja dan pemberi kerja dalam pengisian lowongan kerja sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan.
- b. Mewujudkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi kerja agar mampu bersaing dalam pasa kerja; dan
- c. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan.

Kemudian berdasarkan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 08 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa :

“Jumlah tenaga kerja yang diprioritaskan untuk tenaga kerja lokal sebagaimana ayat 3 (tiga) Pasal 19 sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) dari jumlah tenaga kerja yang diterima”.

¹Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 08 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan

bahwa :

“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.²

Setelah itu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi dasar hukum pelaksanaannya dimana pemerintah melimpahkan kewenangannya kepada pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten atau pemerintahan kota untuk mengatur daerahnya masing-masing. Artinya daerah melaksanakan urusan pemerintahan untuk mengambil kebijakan dalam penyelenggaraan kegiatan daerahnya dan dinilai daerah tersebut mampu dan mandiri untuk memberikan pelayanan sebagai bentuk peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah.

Kewenangan yang diberikan oleh pemerintah kepada pemerintah daerah tersebut merupakan wujud dari sistem desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang oleh pemerintah pusat kepada daerah berbentuk otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.³ Dalam hal ini pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Kedudukan peraturan daerah dalam peraturan perundang-undangan dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Jenis dan hirarki peraturan

² Undang-Undang Dasar Tahun 1945

³ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indoneisa*, (Jakarta : Raja Grapindo Persada,2005),



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perundang-undangan adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR);
- c. Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (UU/Perpu);
- d. Peraturan Pemerintah (PP)
- e. Peraturan Presiden (Perpres);
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota⁴

Untuk melaksanakan peraturan-peraturan yang terdapat dalam hirarki tersebut maka peraturan yang dibawahnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang diatasnya sesuai dengan azasnya yang berbunyi “*lex superior derogat legi inferiori*”. Peraturan daerah (perda) merupakan peraturan yang dibuat oleh kepala daerah provinsi maupun kabupaten/kota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi maupun kabupaten/kota, dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi pemerintah daerah.⁵ Peraturan daerah dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.⁶

Tujuan utama dari peraturan daerah adalah memberdayakan masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah, dan pembentukan peraturan daerah harus

⁴ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

⁵ Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-Undangan*, (Yogyakarta : Kanisius, 2007), Cet. Ke-7, h 202

⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta ini milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan pada umumnya antara lain; memihak kepada kepentingan rakyat; menjunjung tinggi hak asasi manusia, berwawasan lingkungan; dan berbudaya.⁷

Walaupun dalam hirarki peraturan daerah merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan yang secara jelas menempati urutan terakhir. Namun, suatu peraturan merupakan produk hukum yang harus ditaati dan dipatuhi oleh semua pihak tanpa terkecuali. Karena hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa, demikian halnya dengan peraturan daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 08 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan yang harus ditaati dan dipatuhi oleh semua orang maupun perusahaan yang ada dan beroperasi di wilayah Kabupaten Rokan Hilir.

Masalah ketenagakerjaan memang merupakan bagian urusan dari pemerintah kabupaten/kota yang sangat penting karena menyangkut kesejahteraan masyarakat. Setiap tahun jumlah pengangguran semakin meningkat, namun peluang kerja semakin kecil. Oleh karena itu, masalah kesempatan mendapatkan pekerjaan yang layak sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 adalah menjadi sesuatu yang sangat penting, karena kemajuan dari suatu daerah juga ditentukan oleh tingkat kesejahteraan masyarakatnya, dan ini akan diperoleh melalui pekerjaan yang layak bagi setiap warga negaranya. Sehingga kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak bagi masyarakat Kabupaten Rokan Hilir juga menjadi tanggung jawab dari pemerintah Kabupaten Rokan Hilir sehingga diatur dalam sebuah Peraturan Daerah.

⁷ Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2005), h 131

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta dilindungi UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setiap perusahaan, usaha bisnis atau perdagangan sudah pasti membutuhkan tenaga kerja, karena tidak mungkin pekerjaan yang banyak dan dalam jumlah yang besar dapat dilakukan oleh beberapa orang, pasti membutuhkan banyak orang dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut.

Namun dalam pelaksanaannya, rekrutmen tenaga kerja lokal oleh PT. Jatim yang berada di Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana ungkapan salah satu karyawan PT. Jatim menyatakan bahwa terhadap tenaga kerja yang ada pada PT. Jatim itu tidak sampai 60% tenaga kerja lokal, paling banyak hanya 20% tenaga kerja lokal, kebanyakan tenaga kerja yang ada pada PT. Jatim adalah tenaga kerja di luar dari Daerah Kabupaten Rokan Hilir.⁸

Hal ini justru bertentangan dengan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 08 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan bahwa jumlah tenaga kerja yang diprioritaskan untuk tenaga kerja lokal sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) dari jumlah tenaga kerja yang diterima. Hal ini juga dibenarkan oleh Jonathan selaku tenaga kerja yang ada pada PT. Jatim yang menyatakan bahwa tenaga kerja yang ada di PT. ini mayoritas adalah pekerja dari luar Kabupaten Rokan Hilir.

Selanjutnya berdasarkan perjanjian kerja sama yang telah dilakukan pada Senin 22 Juni 1998 antara PT. Jatim dengan KUD Bagan Siapi-api dalam pembangunan pengelolaan dan pemasaran hasil perkebunan kelapa sawit sebagai realisasi pelaksanaan program kemitraan bapak angkat-anak angkat dalam pengembangan ekonomi pedesaan di Kecamatan Kubu Babusalam, Kabupaten

⁸ Jonathan (Karyawan PT. Jatim), wawancara, Tanggal 20 Oktober 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rokan Hilir memang di dalam perjanjian kerja sama tersebut tidak ada menyebutkan adanya penempatan tenaga kerja lokal secara jelas, namun perlu diketahui setelah di undangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 08 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan maka PT. Jatim harus mematuhi Peraturan Daerah tersebut sebagai *ius constitutum* di Kabupaten Rokan Hilir sebagai daerah yang otonom. Dalam penempatan tenaga kerja lokal 60% (enam puluh persen) dari jumlah tenaga kerja yang diterima.

Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut, penulis tertarik mengkaji lebih lanjut untuk mengetahui dari pelaksanaan rekrutmen tenaga kerja lokal PT. Jatim berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. Maka dari itu penulis mengangkat permasalahan ini dengan judul penelitian **“Pelaksanaan Rekrutmen Tenaga Kerja Lokal PT. Jatim Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan Di Kecamatan Kubu Babusalam Kabupaten Rokan Hilir”**

B. Batasan Masalah

Agar pembahasan penelitian ini lebih terfokus, tersusun sistematis dan terarah maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian ini terhadap bagaimana pelaksanaan rekrutmen tenaga kerja lokal PT. Jatim berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan di Kecamatan Kubu Babusalam Kabupaten Rokan Hilir, serta faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan rekrutmen tenaga kerja lokal mandat PT. Jatim.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan rekrutmen tenaga kerja lokal PT. Jatim berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan di Kecamatan Kubu Babusalam Kabupaten Rokan Hilir?
2. Apa faktor penghambat pelaksanaan rekrutmen tenaga kerja lokal PT. Jatim?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan rekrutmen tenaga kerja lokal PT. Jatim berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan di Kecamatan Kubu Babusalam Kabupaten Rokan Hilir.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat pelaksanaan rekrutmen tenaga kerja lokal PT. Jatim.

2. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Bagi peneliti dapat menambah wawasan dengan mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh secara teori di lapangan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, dapat memberikan suatu karya peneliti baru yang dapat mendukung dalam pelaksanaan rekrutmen tenaga kerja lokal PT. Jatim berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan di Kecamatan Kubu Babusalam Kabupaten Rokan Hilir.

2. Secara Praktis

Memberikan informasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan rekrutmen tenaga kerja local PT. Jatim Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan di Kecamatan Kubu Babusalam Kabupaten Rokan Hilir.

3. Secara Akademis

Kegunaan akademis yaitu penelitian ini di harapkan menjadi bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis yang ingin meneliti hal yang sama.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu atau metode penelitian adalah suatu cara atau jalan untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap segala permasalahan.⁹ Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu berdasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian dilakukan dengan cara- cara yang masuk akal. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu

⁹ Joko Subagyo, *Metode penelitian dalam teori dan praktik*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2011) jilid 1, h.1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

5

dapat diamati oleh indra manusia, sehingga orang lain dapat mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.¹⁰

1. Jenis Penelitian Dan Metode Pendekatan

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan yaitu penelitian yang mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat.¹¹

Adapun metode pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris atau sosiologi hukum yaitu pendekatan yang melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.¹² Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang di gunakan untuk melihat aspe-aspek hukum dalam interaksi sosial dan bagaimana hukum beroperasi di dalam masyarakat. Penelitian ini di lakukan terhadap rekrutmen tenaga kerja lokal yang ada di PT. Jatim, Kecamatan Kubu Babusalam, Kabupaten Rokan Hilir dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta, kemudian di lanjutkan dengan menemukan masalah, kemudian menuju kepada identifikasi masalah dan pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang akan penulis lakukan terletak di PT. Jatim, Kecamatan Kubu Babusalam, Kabupaten Rokan Hilir.

¹⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:sinar Grafika, 2011),h.24

¹¹ Husaini Usman dkk, *Metodologi Penelitian Sosial*. (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2006) h.

¹² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:sinar Grafika,2011), h.175

1. Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Di larang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah pihak-pihak yang dijadikan sampel dalam sebuah penelitian yaitu Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Rokan Hilir, Jeneral Meneger PT. Jatim, Tokoh Masyarakat Rokan Hilir, serta Karyawan yang terdapat di PT. Jatim. Sedangkan Objek penelitian adalah yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Objek penelitian yang akan di teliti adalah pelaksanaan rekrutmen tenaga kerja lokal PT. Jatim berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan di Kecamatan Kubu Babusalam Kabupaten Rokan Hilir.

4. Populasi dan Sampel

- Populasi penelitian adalah keseluruhan sampel penelitian atau objek yang akan diteliti.
- Sampel

Sampel adalah sebagian yang diambil dari seluruh objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi.¹³ Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel.

¹³ Juliansyah Noor, *Metode Peenelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Grub, 2011), h,155

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel I.1

Tabel Populasi dan Sampel

Responden	Populasi	Sampel	Persentase	Keterangan
Komisaris PT. Jatim	1 Orang	1 Orang	100%	Wawancara
Tokoh Masyarakat Rokan Hilir	30 Orang	3 Orang	10%	Wawancara
Sekretaris Ketenagakerjaan Rokan Hilir	1 Orang	1 orang	100%	Wawancara
Karyawan PT. Jatim	160 orang	5 orang	3 %	Wawancara
Jumlah	192 orang	10 orang		

c. Sumber Data

Sumber data adalah tempat di perolehnya data.¹⁴ Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian di olah oleh peneliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang di peroleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan.

Data sekunder tersebut, dapat dibagi menjadi :

¹⁴ Zainuddin Ali, *Op Cit.* h.176

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian yang di bahas. Bahan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan, antara lain :

- a. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 08 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya.

1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data perlu dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk mendapatkan data-data yang valid dalam penelitian. Peneliti menggunakan metode-metode sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Observasi

Peneliti mengumpulkan data melalui pengamatan langsung di tempat penelitian, Hasil dari pengamatan tersebut peneliti gunakan sebagai tambahan data informasi dalam penelitian.

2. Wawancara

Peneliti melakukan percakapan kepada narasumber untuk memperoleh informasi dengan cara memberikan pertanyaan untuk memperoleh data-data yang ingin diteliti.

e. Teknik Analisis Data

Analisa data yang dilakukan dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini adalah terlebih dahulu diuraikan beberapa permasalahan yang dimunculkan guna memberikan arah terhadap penelitian yang dilakukan. Data yang dikumpulkan secara keseluruhan selanjutnya akan dibahas atau dianalisa. Untuk menggambarkan apa yang telah dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan maupun perilaku yang nyata, peneliti menggunakan metode kualitatif.

Kemudian pada akhirnya ditarik suatu kesimpulan yang meliputi keseluruhan hasil pembahasan atau analisa data yang telah dilakukan. Dalam penarikan kesimpulan penulis menggunakan metode induktif. Metode induktif adalah suatu yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dari peraturan-peraturan atau prinsip-prinsip khusus menuju penulisan umum.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta ini milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

F. Sistematika Penulisan

Dalam melakukan pembahasan, akan dibagi dalam lima bagian penulisan dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini peneliti memaparkan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini peneliti memaparkan tentang gambaran umum lokasi penelitian, yaitu PT. Jatim dan Kecamatan Kubu Babusalam, Kabupaten Rokan Hilir.

BAB III TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisikan tentang konsep- konsep yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian, yang meliputi tentang konsep pemerintahan daerah, konsep tenaga kerja dan konsep tenaga kerja lokal berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai pelaksanaan rekrutmen tenaga kerja lokal PT. Jatim berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan di Kecamatan Kubu Babusalam Kabupaten Rokan Hilir serta faktor-faktor penghambat pelaksanaan rekrutmen tenaga kerja lokal PT. Jatim.

BAB V PENUTUP

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bab ini menyajikan tentang kesimpulan dan saran.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Kecamatan Kubu Babusalam

1. Gambaran Umum Kecamatan Kubu Babusalam

Kecamatan Kubu Babussalam merupakan salah satu kecamatan yang terdapat di Kabupaten Rokan Hilir yang diresmikan oleh Bupati Rokan Hilir pada tanggal 15 Maret 2012 yang merupakan pecahan dari Kecamatan Kubu.¹⁵

Jumlah Penduduk Kecamatan Kubu Babussalam saat ini ± 25.426 Jiwa, yang terdiri dari 5.859 untuk Kepala Keluarga. Adapun luas wilayah Kecamatan Kubu Babussalam $\pm 530,53$ KM² terdiri dari 12 (dua belas) kepenghuluan dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan : Selat Melaka
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan :Kecamatan Bagan Senembah
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan :Kecamatan Simpang Kanan, Kecamatan Kubu
- d. Sebalah Timur berbatasan dengan :Kecamatan Bangko Pusako, Kecamatan Pekaitan

Dari 12 (Dua Belas) kepenghuluan terdapat 4 (empat) kepenghuluan yang berada pada wilayah Pesisir yaitu :

1. Kepenghuluan Sungai Panji-Panji
2. Kepenghuluan Pulau Halang Muka
3. Kepenghuluan Pulau Halang Belakang

¹⁵ Profil Kecamatan Kubu Babussalam



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

4. Kepenghuluan Pulau Halang Hulu

Sedangkan Kepenghuluan lainnya berada pada daratan yang terdiri dari:

1. Kepenghuluan Teluk Nilap
2. Kepenghuluan Sungai Majo
3. Kepenghuluan Sungai Majo Pusako
4. Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri
5. Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri Hilir
6. Kepenghuluan Sungai Pinang
7. Kepenghuluan Jojol
8. Kepenghuluan Teluk Nilap Jaya

Untuk aparatur kepenghuluan Kecamatan Kubu Babussalam yang terdiri dari Dusun, Rukun Warga (RW), dan Rukun Tetangga (RT) berjumlah :

- Jumlah Dusun : 31 Dusun
- Jumlah RW : 52 RW
- Jumlah RT : 125 RT

Mata pencarian Kecamatan Kubu Babussalam dapat kami bagi menjadi dua bagian sesuai dengan keadaan wilayah¹⁶ :

- a. Penduduk yang berada di wilayah daratan pada umumnya bermata pencarian sebagai Petani, PNS dan Wiraswasta.
- b. Luas lahan pertanian dan perkebunan masyarakat dapat kami gambarkan sebagai berikut :
 - Luas tanaman padi : \pm 1.056 Ha

¹⁶Ibid.,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Luas tanaman sawit : \pm 5.100 Ha
- Disamping itu dapat pula sebuah Perusahaan Perkebunan yang luas yaitu PT. Jatim Jaya Perkasa.
- c. Untuk penduduk yang berada pada Pesisir dan Pulau bermata pencarian sebagai nelayan dan buruh.
- d. Khusus untuk kepenghuluan yang berada di Pulau Halang terdapat pengolahan ikan dan udang baik secara tradisional maupun dengan menggunakan mesin
- e. Untuk itu pengolahan ikan asin dilakukan secara tradisional sedangkan untuk pengolahan terasi digunakan dengan menggunakan mesin.

Sampai saat ini jumlah PNS di Kantor Camat Kubu Babussalam baru 4 (empat) orang yaitu Camat dan Sekretaris Kecamatan dan staf juga beberapa oleh tenaga honorer.¹⁷

2. Monografi Kecamatan Kubu Babusalam

2.1 Luas dan batas-batas wilayah

- Luas wilayah : \pm 530,35 KM
- Batas wilayah :
 - Sebelah utara : Selat Melaka dan Kecamatan Kubu
 - Sebelah selatan : Kecamatan Bagan Senembah
 - Sebelah barat : Kecamatan Simpang Kanan dan Kec. Kubu

¹⁷ Ibid.,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Sebelah timur : Kecamatan Pekaitan dan Kec.

Bangko Pusako

1.2 Tinggi Pusat Pemerintahan Wilayah

Kecamatan dari permukaan laut : 5 M

a. Desa/kelurahan yang terjauh : 12 KM

b. Ibukota Kabupaten : 150 KM

c. Ibukota Propinsi : 650 KM

1.3 Kondisi Geografis

1. Curah hujan

a. Jumlah hari dengan jumlah hujan

Yang terbanyak :

b. Banyaknya curah hujan :

2. Suhu udara :

a. Suhu maximum/minimum : 34/27 °C

b. Suhu udara rata-rata : 24°C

3. Bentuk wilayah

a. Datar sampai berombak :

b. Berombak sampai berbukit :

c. Berbukit sampai bergunung :

3. Luas Daerah Wilayah

a. Tanah kering

a. Pekarangan/bangunan/emplasemen : 632 Ha

b. Tegal/kebun :

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Ladang/tanah huma :
- Tanah Basah :
- Tambak :
- Rawa/pasang surut :
- Tanah gambut : 3000 Ha

2.4 Tanah Hutan

- Hutan Lebat : 300 Ha
- Hutan Belukar : 400 Ha
- Hutan Rawa : 600 Ha

2.5 Tanah Perkebunan

- Perkebunan Negara :
- Perkebunan Swasta : 30.000 Ha

4. Prasarana Pemerintah Kepenghuluan/Kelurahan Se-Kecamatan

- Balai Kepenghuluan/Kelurahan : Kepenghuluan
- Kantor Kepenghuluan/Kelurahan : 12 Kepenghuluan
- Banyaknya Bengkok Perangkat Kepenghuluan :
- Tanah Sawah :
- Tanah Kering :
- Tanah/Kolam :
- Lain-lain :

5. Pemerintah Kecamatan

- Kantor Pemerintah Wilayah Kecamatan :
- Status Kepemilikan : Milik Pemerintah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Luas Tanah	: 20 Ha
c. Luas Bangunan	: 2.075 M ²
d. Apabila Milik Pemerintah	:
- Kantor Camat Dibangun tahun	: 2012
- Kantor Penghulu Teluk Nilap	: 2010
- Kantor Penghulu Sungai Majo	: 2011
- Kantor Penghulu Sungai Majo Pusako	: -
- Kantor Penghulu Rantau Panjang Kiri	: 2016
- Kantor Penghulu Rantau Panjang Kiri Hilir:	2011
- Kantor Penghulu Sungai Pinang	: 2011
- Kantor Penghulu Jojol	: 2005
- Kantor Penghulu Sungai Panji-Panji	: -
- Kantor Penghulu Pulau Halang Muka	: 2005
- Kantor Penghulu Pulau Halang Hulu	: -
- Kantor Penghulu Pulau Halang Belakang:	2005
- Kantor Penghulu Teluk Nilap Jaya	: -
- Sumber Dana	: APBD Rokan Hilir
- APBN	:
- INPRES	:
- APBD I	:
- APBD II	: Rp.
- Lain-lain yang sah	: Rp.
e. JUMLAH	:



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Bangunan Bertingkat : 2 Unit
- 5.2 Rumah Jabatan Camat
 - a. Status Rumah Jabatan Camat : Milik Pemerintah Kab. Rokan Hilir
 - b. Luas Bangunan : 225 M²
 - c. Apabila Milik Pemerintah :
 - Dibangun Tahun : 2012
 - Sumber Dana : APBD Rokan Hilir
 - APBN :
 - APBD I :
 - APBD II :
 - Swadaya :
 - Jumlah :
 - d. Kondisi Bangunan : Baik
- 5.3 Jenis Pegawai Kantor Kecamatan :
 - a. Pegawai Pusat Dpk :
 - b. Pegawai Pusat Dpk :
 - c. Pegawai Daerah /Otonom : 12 Orang
- 5.4. Eselonering Jabatan Perangkat Tingkat Kecamatan
 - a. Eselon III b : 1 Orang
 - b. Eselon IVa : 2 Orang
 - c. Eselon Va :
 - d. ESelon Vb : 2 Orang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

6. Prasarana/Sarana Pengangkutan Dan Komunikasi

- 6.1. - Lalu lintas melalui darat Kecamatan : 21 Buah
 - Lalu lintas melalui Air / Sungai / Laut : 2 Buah
- 6.2. Apabila melalui Air / Laut / Sungai, Jumlah
 - Dermaga : 5 Buah
- 6.3. Lalu lintas darat melalui
 - Jalan Aspal : 10 Km
 - Jalan Diperkeras : 15 KM
 - Jalan Tanah : 70 KM
- 6.4. Sarana Umum yang dapat digunakan oleh penduduk Kecamatan
 - Motor Air : 2 Buah
 - Sepeda / Ojek : 200 Buah

7. Panjang Jalan Dan Jembatan

- 7.1. Jenis Jalan
 - a. Jalan Negara :
 - b. Jalan Propinsi : 45 KM Rusak
 - c. Jalan Kota : 60 KM
 - d. Jalan kelurahan/Kepenghuluan : 50 KM Rusak

Jumlah : 158 KM
- 7.2. Kelas Jalan
 - a. Jalan Kelas I : Rusak
 - b. Jalan kelas II : Rusak
 - b. Jalan Kelas III : 60 KM

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Jalan Kelas IIIa :
- d. Jalan Kelas Kelurahan : 50 KM

7.3. Jembatan

- a. Jembatan Beton/Batu/Bata : 38 Buah
- b. Jembatan Besi : Buah
- c. Jembatan Kayu/Bambu : 3 Buah

8 Sarana Perekonomian

8.1. Koperasi

- a. Koperasi Simpan Pinjam :
- b. Koperasi Unit Desa/ KUD :
- h. Koperasi Lainnya : 25 Unit

8.2. Pasar Bangunan Permanen / Semi Permanen : 1 Buah

8.3. Pasar tanpa bangunan semi permanen : 1 Buah

8.4. Jumlah toko /kios/warung : 121 Buah

8.5. Bank : 2 Buah

9 Jumlah Perusahaan / Usaha

9.1. Industri

- a. Besar dan Sedang : 1 Buah
- Tenaga Kerja : 2000 Orang
- b. Kecil : Buah
- Tenaga Kerja : Orang
- c. Rumah Tangga : Buah
- Tenaga Kerja : Orang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

10. Sarana Sosial/Budaya

10.1. Pendidikan

10.1.1. TK

- Jumlah Sekolah	: 15 Sekolah
- Jumlah Murid	: 521 Siswa
- Jumlah Guru/Pengajar	: 39 Orang
- Prasarana Fisik	: 15 RKB

10.1.2. Sekolah Dasar

a. Sekolah Dasar Negeri

-Jumlah Sekolah	: 18 Sekolah
- Jumlah Murid	: 4185 Siswa
- Jumlah Guru/Pengajar	: 347 Orang
- Prasarana Fisik	: 253 RKB

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Perpustakaan : - RKB

10.1.3. Sekolah Lanjutan Pertama (SLTP)

a. SMTP Negeri

- Jumlah Sekolah : 3 Sekolah
 - Jumlah Murid : 1246 Siswa
 - Jumlah Guru/Pengajar : 129 Guru
 - Prasarana Fisik : 28 RKB
 - Perpustakaan : 3 RKB

b. SMTP Swasta Umum

- Jumlah Sekolah : 1 Sekolah
 - Jumlah Murid : 72 Orang
 - Jumlah Guru/Pengajar : 15 Orang
 - Prasarana Fisik : 6 RKB

c. SMTP Swasta Islam

- Jumlah Sekolah : 3 Sekolah
 - Jumlah Murid : 1442 Siswa
 - Jumlah Guru/Pengajar : 85 Orang
 - Prasarana Fisik :

- Perpustakaan :

d. SMTP Swasta Protestan

- Jumlah Sekolah : 2 Sekolah
 - Jumlah Murid : 265 Siswa
 - Jumlah Guru/Pengajar : 45 Guru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Prasarana Fisik : 12 RKB

10.1.4. Sekolah Menengah Tingkat Atas

a. SMTA Negeri

- Jumlah Sekolah : 2 Sekolah
 - Jumlah Murid : 1272 Siswa
 - Jumlah Guru/Pengajar : 87 Orang
 - Prasarana Fisik : 26 RKB
 - Perpustakaan : 2 RKB

b. SMTA Swasta Islam

- Jumlah Sekolah : 2 Sekolah
 - Jumlah Murid : 333 Siswa
 - Jumlah Guru/Pengajar : 46 Guru
 - Prasarana Fisik : 14 RKB
 - Perpustakaan : 2 RKB

c. SMTA Swasta Protestan

- Jumlah Sekolah : 1 Sekolah
 - Jumlah Murid : 88 Siswa
 - Jumlah Guru/Pengajar : 16 Guru
 - Prasarana Fisik : 3 RKB
 - Perpustakaan : 1 RKB

d. SMTA Kejuruan Swasta

- Jumlah Sekolah : 1 Sekolah
 - Jumlah Murid : 177 Siswa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Jumlah Guru/Pengajar : 18 Orang
- Prasarana Fisik : 6 RKB
- Perpustakaan :

e. Perguruan Tinggi Swasta

- Jumlah : 1 Kampus
- Jumlah Mahasiswa : 770 Mahasiswa
- Jumlah Dosen/Pengajar : 80 Orang
- Prasarana Fisik : 20 RKB
- Fasilitas Laboratorium : -
- Perpustakaan : 1 RKB

10.2 Jumlah tempat Ibadah

- Mesjid : 18 Masjid
- Surau/Mushola : 29 Musholla
- Gereja : 2 Gereja
- Kuil/Pura : -
- Kelenteng : 5 Klenteng

10.3 Banyaknya Rumah Penduduk

- Rumah Menurut sifatnya dan badannya :
 - Dinding terbuat dari batu/gedung permanen : 397 Unit
 - Dinding terbuat dari sebagian Batu/Gedung : 698 Unit
 - Dinding terbuat dari kayu/Papan : 1497 Unit
 - Dinding terbuat dari Bambu/Lainnya :
 - Rumah Panggung :

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Rumah Diatas air (Mengapung) :
- b. Puskesmas
 - Pengunjung yang sakit :
 - Januari s/d Juni : 1.756 Orang
 - Juli s/d Desember :
 - Dokter : 6 Orang
 - Perawat : 87 Orang
 - Bidan : 48 Orang
- d. Puskesmas Pembantu
 - Dokter :
 - Perawat : 5 Orang
 - Bidan : 3 Orang

11. Pegawai Pemerintahan Kecamatan

1. Jumlah Pegawai Kantor Kecamatan
 - a. Pegawai Golongan IV : 2 Orang
 - b. Pegawai Golongan III : 1 Orang
 - c. Pegawai Golongan II : 3 Orang
 - d. Pegawai Golongan I :
2. Jumlah Pegawai Instansi Vertikal dan Otonom di Tingkat Kecamatan Non Pegawai Kecamatan
 - a. Pegawai Golongan IV :
 - b. Pegawai Golongan III : 1 Orang
 - c. Pegawai Golongan II : - Orang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Pegawai Golongan I : - Orang
3. Sarana kerja kantor kecamatan
 - a. Telepon Otomat/Non otomat :
 - b. Radio Telekomunikasi :
 - c. Jumlah Mesin Tik : 2 Buah
 - d. Meja Kerja : 15 Buah
 - e. Kursi Kerja : 15 Buah
 - f. Meja Kursi Tamu : 1 Set
 - g. Lemari/Kardek : 10 Unit
 - h. Ruang Rapat : 1 Ruangan
 - i. Ruang Data/Operator Room : 1 Ruangan
 - j. Gedung Serba Guna :
 - k. Balai Pertemuan :
 - l. Kendaraan Dinas Roda 2 :
 - m. Kendaraan Dinas Roda 4 : 1 unit

12 Kependudukan

1. Jumlah Kepala Keluarga : 5.859 KK
2. Penduduk menurut jenis kelamin : 25.426 Jiwa
 - a. Jumlah Laki-laki : 12.876 Jiwa
 - b. Jumlah Perempuan : 12.550 Jiwa
3. Penduduk menurut agama
 - a. Islam : 19.824 Jiwa
 - b. Katholik :



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- | | |
|----------------------|--------------|
| c. Protestan/Kristen | : 2.482 Jiwa |
| d. Hindu | : |
| e. Budha | : 3.120 Jiwa |
| f. Konghuchu | |

4. Penduduk Menurut Usia

- | | |
|--------------------|--------------|
| a. 0 – 6 tahun | : 4.501 Jiwa |
| b. 7 – 12 tahun | : 5.785 Jiwa |
| c. 13 – 24 tahun | : 5.342 Jiwa |
| d. 25 – 55 tahun | : 4.921 Jiwa |
| e. 26 – 79 tahun | : 4.667 Jiwa |
| f. 80 tahun keatas | : 210 Jiwa |

5. Penduduk menurut mata pencarian

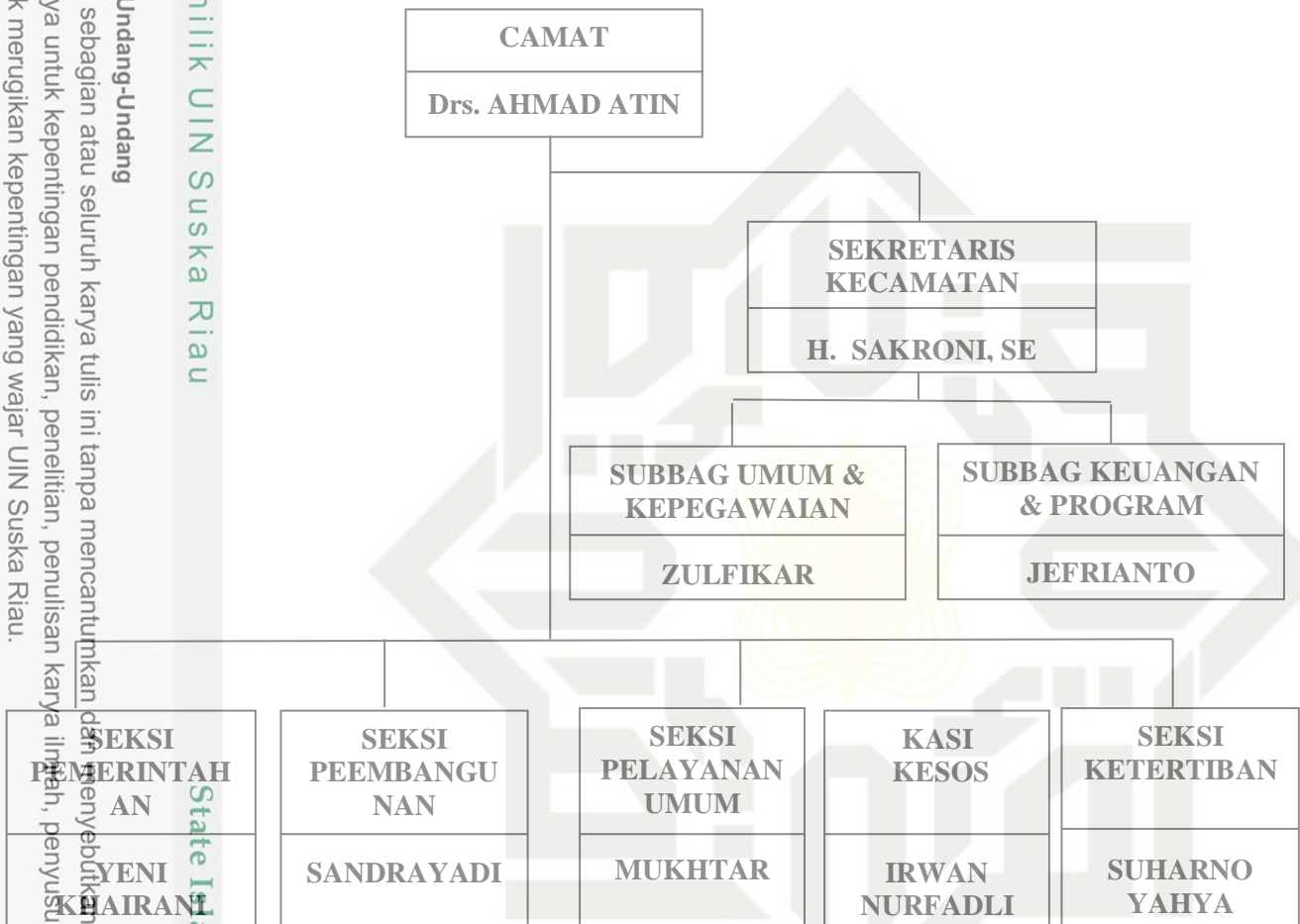
- | | |
|-----------------------------------|--------------|
| a. Petani | |
| - Petani pemilik tanah | : 2500 H |
| - Petani Penggarap tanah | : 158 H |
| - Buruh | : 1.380 Jiwa |
| b. Nelayan | : 1.586 Jiwa |
| c. Pengusaha sedang/besar | : 187 Orang |
| d. Buruh Industri | : 876 Orang |
| e. Buruh Bangunan | : 589 Orang |
| f. Buruh perkebunan (besar+kecil) | : 1500 Orang |
| g. Pedagang | : 500 Orang |
| h. Pegawai Negeri sipil | : 397 Orang |



13. Struktur Organisasi Kecamatan Kubu Babusalam

Tabel II.2¹⁸

Struktur Organisasi Kecamatan Kubu Babusalam



B. PT. Jatim

1. Gambaran Umum PT. Jatim

PT. Jatim Kubu Kabupaten Rokan Hilir didirikan berdasarkan Akta

Notaris Hadi Irawan, SH. No. 14 tanggal 21 Oktober 1997, dengan pengesahan

resmi lainnya dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat

keputusan No. C-218.HT. 08.01 tanggal 25 Oktober 1997. PT. Jatim Jaya

¹⁸Ibid.,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perkasa (JJP) merupakan salah satu yang bergerak dibidang pengolahan kelapa sawit dengan luas Areal Pabrik 39,61 Ha yang beralamat Simpang Damar Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir Riau.¹⁹

PT. Jatim Jaya Perkasa (JJP) merupakan perusahaan yang modal sahamnya dimiliki oleh tiga orang, yaitu : Ganda 50%, Johannes 30%, dan Harino 20%. Adapun bentuk perusahaan ini adalah pengolahan kelapa sawit, dan menghasilkan minyak kelapa sawit setengah jadi. PT. Jatim Jaya Perkasa adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan sawit dan pabrik pengolahan sawit yang beroperasi di daerah Rokan Hilir, yang melakukan ekspor palm dan kernel oil ke berbagai negara, melalui pelabuhan Dumai.

PT. Jatim Jaya Perkasa terdiri dari seorang Direktur dan beberapa personalia yang bertugas untuk melaksanakan tugas-tugas administrasi perkantoran, mempersiapkan dokumen-dokumen dan sebagainya. Dalam hal ini tugas personalia pada prinsipnya dilakukan melalui arahan dan petunjuk dari direktur.

PT. Jatim Jaya Perkasa kebun Simpang Damar melakukan penanaman kelapa sawit secara bertahap dimulai Tahun 1998, lokasi kegiatan berada di Kecamatan Kubu dan Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Riau. Luas HGU yang diberikan kepada PT. Jatim Jaya Perkasa yang meliputi areal inti seluas 8.200 Ha dan Areal Kemitraan dialokasikan seluas 3.400 Ha.

¹⁹Pofil PT. Jatim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kegiatan perkebunan PT. Jatim Jaya Perkasa meliputi penanaman, perawatan tanaman serta pemanenan, rangkaian kegiatan tersebut dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, seperti terjadinya erosi, penurunan kualitas air, penurunan kualitas udara serta konflik sosial. Untuk meminimalkan dampak negatif dari kegiatan perkebunan PT. Jatim Jaya Perkasa maka dilaksanakan RKL dan RPL sesuai dengan dokumen yang telah disetujui oleh instansi terkait.

Pembangunan perkebunan dan pabrik pengolahan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT. Jatim Jaya Perkasa bertujuan untuk²⁰:

1. Memanfaatkan sumberdaya lahan basah yang tersedia di Kabupaten Rokan Hilir sesuai dengan peruntukannya.
2. Meningkatkan produktivitas lahan dalam jangka waktu yang cukup lama, dimana akan mencapai 25 tahun dan selanjutnya memberikan kontribusi terhadap peningkatan volume minyak sawit (CPO) dan inti sawit (PK), baik untuk kebutuhan dalam negeri maupun ekspor.
3. Sebagai bentuk upaya partisipasi aktif dalam membantu pemerintah untuk meningkatkan investasi di Kabupaten Rokan Hilir tanpa mengabaikan keuntungan bagi perusahaan.
4. Membuka kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat sekitar lokasi kegiatan dan membantu pemerintah meningkatkan pendapatan asli daerah melalui setoran pajak.

²⁰*Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di samping itu kegiatan yang dilaksanakan memiliki kegunaan dan keperluan sebagai berikut²¹:

1. Membantu pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam rangka pengembangan wilayah melalui program pembangunan perkebunan dan pabrik pengolahan kelapa sawit sesuai dengan wilayah komoditinya.
2. Memenuhi kebutuhan pasar dalam dan luar negeri terhadap permintaan produk olahan kelapa sawit.
3. Terwujudnya peran serta masyarakat, baik sebagai sumber tenaga kerja, mitra usaha, maupun sebagai objek pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat.
4. Memiliki kegunaan atau manfaat tidak langsung dalam memberi kontribusi terhadap pendapatan asli daerah.

Dengan berdirinya PT. Jatim Jaya Perkasa yang aktivitasnya membuka areal baru yang jauh dari pemukiman penduduk, membawa perubahan diantaranya adanya minat penduduk untuk membuka lahan mereka yang berada di pinggir areal HGU PT. Jatim Jaya Perkasa. Penduduk yang mata pencahariannya berdagang, maka mereka akan berdagang barang kebutuhan harian ke perumahan-perumahan karyawan PT. Jatim Jaya Perkasa dengan menggunakan along-along (keranjang rotan). Untuk masyarakat yang mata pencahariannya mencari ikan mereka menangkap ikan di kanal/parit yang ada di lokasi PT. Jatim Jaya Perkasa.

²¹*Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada umumnya areal yang berada di luar HGU PT. Jatim Jaya Perkasa adalah lahan masyarakat tempatan, untuk areal yang masih hutan dimanfaatkan untuk mengambil kayu yang akan dijual ke sawmill-sawmill yang membutuhkan, sementara areal yang mudah dijangkau digunakan untuk kegiatan perkebunan kelapa sawit.

Adapun bidang usaha dari PT. Jatim Jaya Perkasa adalah²²:

1. Menjalankan usaha dalam bidang perkebunan sawit.
2. Menjalankan usaha dalam bidang ekspor.
3. Menjalankan usaha dalam bidang jual beli buah sawit.
4. Menjalankan usaha dalam bidang pengolahan buah sawit.
5. Menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan buah sawit.
6. Menjalankan usaha dalam bidang perkebunan.

Dalam hal menerima permintaan ekspor dari beberapa negara, maka dokumen yang harus dipersiapkan adalah sebagai berikut:

1. Surat Perjanjian
2. Syarat-syarat Khusus Perjanjian
3. Syarat-syarat Umum Perjanjian
4. Daftar biaya
5. Dokumen lain yang tercantum dalam lampiran perjanjian.

²²*Ibid.*,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Visi dan Misi

Visi

Menjadi salah satu perusahaan yang Agribisnis Indonesia yang Terkemuka dengan Pengolahan Terbaik dan memberikan Keuntungan Tinggi.

Misi

Meningkatkan Perkembangan Perusahaan dengan Standar Kualitas Tinggi, Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan serta memberikan Nilai Tambah yang lebih untuk seluruh Stakeholder.

3. Struktur Organisasi PT. Jatim

Struktur organisasi perusahaan merupakan satu faktor penting untuk tercapainya tujuan perusahaan. Oleh karena itu agar tujuan perusahaan dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan maka harus dibuat dan disusun struktur organisasi dengan baik. Struktur organisasi merupakan gambaran pembagian tugas, tanggung jawab serta hubungan-hubungan antara orang-orang atau bagian-bagian dalam organisasi sehingga memungkinkan setiap orang atau bagian itu dapat bekerja secara efektif atau efisien untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

Bentuk organisasi yang terdapat pada PT. Jatim Jaya Perkasa (JJP) Kube Kabupaten Rokan Hilir adalah bentuk garis. Dimana dalam menjalankan usahanya perusahaan membagi tugas-tugas dan tanggung jawab dalam bentuk departemen-departemen, yang masing-masing dipimpin oleh kepala bagian.

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Masing-masing kepala bagian juga membawahi beberapa bagian, seperti terlihat dibawah ini.²³

a. Manejer Pabrik

Adapun tugas dari manajer pabrik yaitu:

- 1) Mengawasi dan mengolah hal-hal yang ada di pabrik
- 2) Bertanggung jawab atas pemeliharaan dan memeriksa segala sesuatu yang terjadi di pabrik

b. Staff Asisten Bengkel

Adapun tugas dari Asisten Bengkel yaitu:

- 1) Mengontrol Bengkel
- 2) Mengintruksikan kepada mandor karyawan hal-hal yang terjadi dibengkel

c. Staff Asisten Proses

Adapun tugas dari Asisten Proses:

- 1) Mengawasi penerimaan TBS yang dikirim dari kebun
- 2) Memonitor penuangan TBS dari truk ke *loading ramp*, proses perebusan (sterilizer) proses penuangan TBS ke *Happer*
- 3) Memonitor temperatur dan level, *degister* dan tekanan *hydraulic*
- 4) Memonitor loses di *St. Nut* dan *kernel* temperatur tangki di St. Klarifikasi dan operasional boiler
- 5) Memonitor penggunaan power supply dan optimalisasi pengoperasian
- 6) Memonitor kualitas air umpan boiler

²³*Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 7) Memonitor pengoperasian unit mesin mengacu pada *material blace*
- 8) Merekomendasikan untuk dimulainya star proses ke atasan dengan mengacu pada ketersediaan dan kontinuitas TBS, kecukupan *water supply*, kecukupan tenaga kerja serta kesiapan maintenance peralatan
- 9) Mencari cara-cara untuk memperbaiki dan meningkatkan masalah mutu.

d. KTU

Adapun tugas dari KTU yaitu :

- 1) Mengontrol operasional keuangan
- 2) Laporan-laporan kantor
- 3) Laporan hasil
- 4) Laporan kasir dan pembukuan
- 5) Laporan tiap hari

e. Umum & Keamanan

Adapun tugas dari Umum dan Keamanan yaitu :

- 1) Mengawasi supir mobil
- 2) Mengawasi tukang kebun dan kebersihan pabrik
- 3) Mengawasi opas kantor
- 4) Mengawasi keamanan

f. Asisten Umum Operasional

Adapun tugas dari Asisten Umum Operasional yaitu:

- 1) Mengawasi mutu TBS
- 2) Mengontrol analis pelaksanaan proses pengolahan TBS
- 3) Mengawasi petugas pengiriman

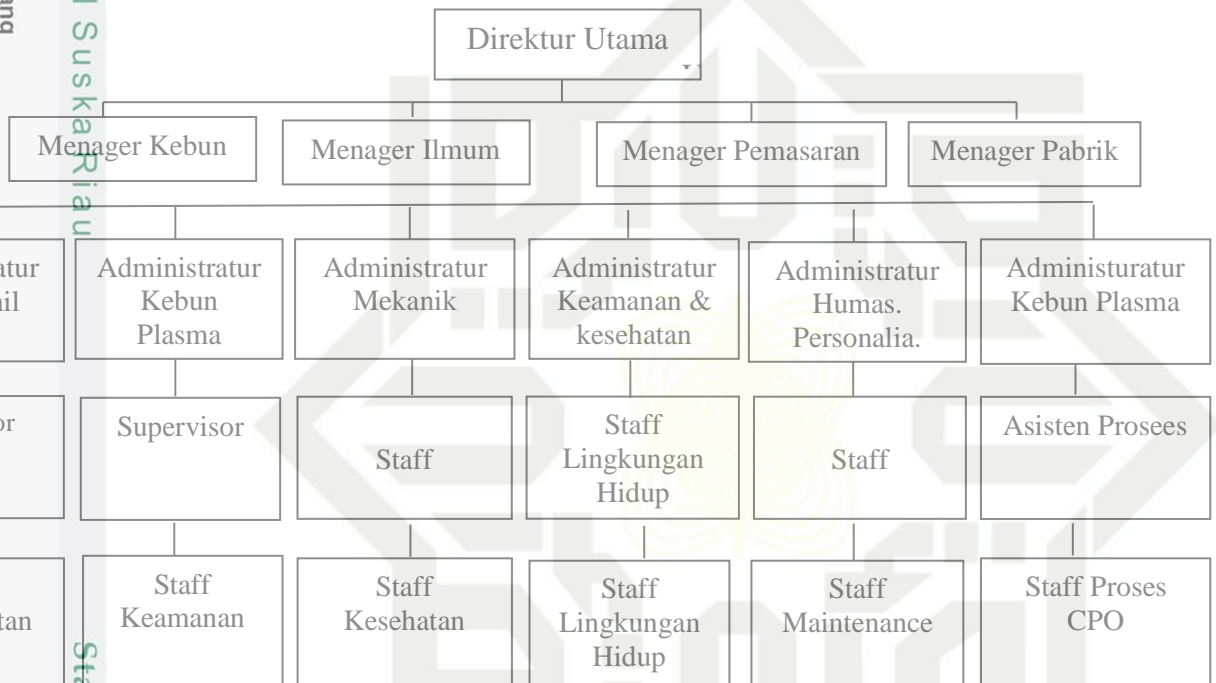


4) Mengawasi petugas sampel

Mandor

Tugas Mandor adalah memandori karyawan yang bekerja di lapangan, dan mandor kepercayaan asisten karyawan yang bekerja.

Tabel II.2



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



A. Pemerintah Daerah

1. Pengertian Pemerintahan Daerah

Pemerintah Daerah secara sederhana berasal dari dua kata yaitu Pemerintah dan Daerah. Selanjutnya, Pemerintah jika ditinjau dari definisi kata (etimologi), yaitu berasal dari kata dasar kata perintah yang berarti melakukan pekerjaan memerintah atau menyuruh, setelah ditambah awalan “Pe” yang menjadi Pemerintah, akan berarti badan atau organisasi yang mengurus. Jika kemudian ditambah dengan akhiran “an”, maka akan menjadi pemerintahan yang berarti perbuatan, cara atau perihal.²⁴

Menurut W.S Sayre, Pemerintah dalam definisi terbaiknya adalah sebagai organisasi dari negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya. Selanjutnya menurut David Apter, Pemerintah adalah satuan anggota yang paling umum yang memiliki tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mencakup dan monopoli praktis yang menyangkut kekuasaan paksaannya.²⁵

Pembentukan Pemerintahan Daerah sesuai dengan amanat pasal 18 UUD Tahun 1945 telah melahirkan berbagai produk Undang-Undang dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah, antara lain Undang-undang Nomor 1 Tahun 1945, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957, Undang-

²⁴ Inu Kencana Syafie, *Ilmu Pemerintahan*, (Jakarta, Bumi Aksara, 2013), h. 8.

²⁵ *Ibid*, h. 11.

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang Nomor 18 Tahun 1965, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, serta terakhir Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah. Secara substansial undang-undang tersebut mengatur tentang bentuk susunan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Penyelenggaraan Pemerintahan adalah Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden, dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan DPRD. Setiap Daerah dipimpin oleh Kepala Pemerintahan Daerah yang disebut Kepala Daerah, untuk Provinsi disebut Gubernur, untuk Kabupaten disebut Bupati, dan untuk Kota disebut Walikota. Kepala Daerah dibantu oleh satu orang Wakil Kepala Daerah, yang masing-masing untuk Provinsi disebut Wakil Gubernur, untuk Kabupaten disebut Wakil Bupati, dan untuk Kota disebut Wakil Walikota.²⁶

2. Asas-Asas Pemerintahan Daerah

Selama ini dipahami bahwa penyelenggaraan pemerintahan di daerah didasarkan tiga asas, yaitu asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Undang-Undang yang mengatur pemerintahan daerah setidaknya dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengatur ketiga macam asas tersebut. Namun, dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (2), ditegaskan bahwa Pemerintahan Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Macam-macam asas

²⁶ Siswanto, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 54-55.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintahan daerah²⁷:

1. Asas Desentralisasi

Asas desentralisasi adalah asas yang menyatakan penyerahan sejumlah urusan pemerintahan dari pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah tingkat yang lebih tinggi kepada pemerintah daerah tingkat yang lebih rendah sehingga menjadi urusan rumah tangga daerah itu. Dengan demikian, prakarsa, wewenang, dan tanggung jawab mengenai urusan-urusan yang diserahkan tadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab daerah itu, baik mengenai politik kebijaksanaan, perencanaan, dan pelaksanaannya maupun mengenai segi-segi pembiayaannya. Perangkat pelaksanaannya adalah perangkat daerah sendiri.

Desentralisasi pada dasarnya terjadi setelah sentralisasi melalui asas dekonsentrasi tidak dapat melaksanakan tugas pemerintahan secara baik dalam arti pemerintahan gagal dalam mewujudkan Pemerintahan yang demokratis. Suatu Pemerintahan yang mampu mengakomodasikan unsur-unsur yang bersifat kedaerahan berdasarkan aspirasi masyarakat daerah. Tujuan desentralisasi adalah agar penyelenggaraan Pemerintahan di daerah lebih disesuaikan dengan keadaan daerah masing-masing dalam rangka desentralisasi dibentuk Daerah otonom.²⁸

2. Asas Dekonsentrasi

Asas dekonsentrasi adalah asas yang menyatakan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat atau kepala wilayah atau kepala instansi

²⁷ Ni'Matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Press, 2011), h.

²⁸ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

vertikal tingkat yang lebih tinggi kepada pejabat-pejabatnya di daerah. Tanggung jawab tetap ada pada pemerintahan pusat. Baik perencanaan dan pelaksanaannya maupun pembiayaannya tetap menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat. Unsur pelaksanaannya dikoordinasikan oleh kepala daerah dalam kedudukannya selaku wakil Pemerintah Pusat.

Amrah Muslimin mengartikan dekonsentrasi ialah pelimpahan dari sebagian kewenangan Pemerintah Pusat pada alat-alat pemerintah pusat yang ada di daerah. Irawan Soejito mengartikan dekonsentrasi adalah pelimpahan kewenangan penguasa kepada pejabat bawahannya sendiri. Sedangkan Joeniarto mengatakan dekonsentrasi adalah pemberian wewenang oleh pemerintah pusat kepada alat-alat perlengkapan bawahan untuk menyelenggarakan urusan-urusannya yang terdapat di daerah.²⁹

3. Asas Tugas Pembantuan

Asas tugas pembantuan adalah asas yang menyatakan tugas turut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintah yang ditugaskan kepada pemerintah daerah dengan kewajiban mempertanggung jawabkannya kepada yang memberi tugas. Misalnya, Kotamadya menarik pajak-pajak tertentu seperti pajak kendaraan, yang sebenarnya menjadi hak dan urusan pemerintah pusat. Bahwa wilayah Indonesia dibagi menjadi daerah-daerah otonom dan wilayah-wilayah administrasi.

Daerah Otonom atau Daerah Swatantra adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang,

²⁹ *Ibid.*,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Daerah ini dibentuk berdasarkan asas desentralisasi. Wilayah administrasi atau wilayah adalah lingkungan kerja perangkat pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan umum di daerah. Wilayah ini dibentuk berdasarkan asas dekonsentrasi.³⁰

B. Tenaga Kerja

1. Pengertian Tenaga Kerja

Tenaga kerja menurut Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa : “Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.”

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 menetapkan bahwa penggunaan istilah pekerja selalu diikuti dengan istilah buruh yang menandakan bahwa Undang-undang ini mengartikan dengan istilah maknanya sama. Pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, memberikan pengertian. “Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.”

Dari pengertian tersebut, dapat dilihat beberapa unsur-unsur yang melekat dari istilah pekerja atau buruh, yaitu sebagai berikut :

- a. Setiap orang yang bekerja (angkatan kerja maupun bukan angkatan kerja tetapi harus bekerja)

³⁰ C.S.T. Kansil, *Pemerintahan Daerah di Indonesia Hukum Administrasi Daerah*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2000), h. 3-4.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Menerima imbalan/upah sebagai balas jasa atas pelaksanaan pekerjaan tersebut.³¹

Secara garis besar penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja.³² Sedangkan menurut DR Payaman tenaga kerja adalah penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, dan yang melaksanakan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga. Secara praksis pengertian tenaga kerja dan bukan tenaga kerja menurutnya hanya dibedakan oleh batas umur.³³

Jadi yang dimaksud dengan tenaga kerja yaitu individu yang sedang mencari atau sudah melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang atau jasa yang sudah memenuhi persyaratan ataupun batasan usia yang telah ditetapkan oleh Undang-undang yang bertujuan untuk memperoleh hasil atau upah untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

Badan Pusat Statistik mendefinisikan tenaga kerja (manpower) sebagai seluruh penduduk dalam usia kerja (15 tahun keatas) yang berpotensi memproduksi barang dan jasa. BPS (Badan Pusat Statistik) membagi tenaga kerja (employed), yaitu:³⁴

- a. tenaga kerja penuh (full employed), adalah tenaga kerja yang mempunyai jumlah jam kerja > 35 jam dalam seminggu dengan hasil kerja tertentu sesuai dengan uraian tugas;

³¹ Agus Midah, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dinamika dan Kajian Teori*, (Bogor : Galia Indonesia, 2010), h. 7.

³² Subijanto, *Peran Negara Dalam Hubungan Tenaga Kerja Indonesia*, *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*. (vol 17 no 6). h. 08.

³³ Sendjun H Manululang, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*. Jakarta : PT Rineka Citra, 2008), h. 03.

³⁴ Wwww.Bps.Go.Id. Situs Resmi Badan Pusat Statistik



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

5. tenaga kerja tidak penuh atau setengah pengangguran (under employed), adalah tenaga kerja dengan jam kerja < 35 jam seminggu; dan
6. tenaga kerja yang belum bekerja atau sementara tidak bekerja (unemployed), adalah tenaga kerja dengan jam kerja $0 > 1$ jam perminggu.

Menurut undang-undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 1, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 8 mengenai perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan meliputi: Kesempatan kerja, Pelatihan kerja. Produktivitas tenaga kerja, hubungan industrial, kondisi lingkungan kerja, pengupahan dan kesejahteraan tenaga kerja.³⁵ Masalah ketenagakerjaan terus menerus mendapat perhatian dari berbagai pihak, seperti pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat dan keluarga. Pemerintah melihat masalah ketenagakerjaan sebagai salah satu bahkan sentral pembangunan nasional, karena ketenagakerjaan itu pada hakikatnya adalah tenaga pembangunan yang banyak sumbangannya terhadap keberhasilan pembangunan bangsa termasuk pembangunan di sektor ketenagaan itu sendiri. Dimana pembangunan ketenagakerjaan bertujuan untuk:

- a. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimum,
5. Menciptakan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan pembangunan nasional,

³⁵ Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan, dan
- d. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

Dalam pembangunan ketenagakerjaan, pemerintah diharapkan dapat menyusun dan menetapkan perencanaan tenaga kerja. Perencanaan tenaga kerja dimaksudkan agar dapat dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan. Strategi dan implementasi program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan. Sebagian besar manusia di muka bumi Indonesia menyadari bahwa dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja memiliki peran dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku (actor) dalam mencapai tujuan pembangunan. Sejalan dengan itu, pembangunan ketenagakerjaan diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan kontribusinya dalam pembangunan serta melindungi hak dan kepentingannya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduan dan kemitraan. Tenaga kerja adalah orang yang bekerja atau mengerjakan sesuatu, orang yang mampu melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja.³⁶

Sumarsono menyatakan tenaga kerja sebagai semua orang yang bersedia untuk bekerja. Pengertian tenaga kerja tersebut meliputi mereka yang bekerja untuk dirinya sendiri ataupun keluarga yang tidak menerima bayaran berupa upah atau mereka yang bersedia bekerja dan mampu untuk bekerja namun tidak ada kesempatan kerja sehingga terpaksa menganggur. Tenaga

³⁶ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, Cetakan Empat, 2011), h. 137

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.³⁷

Tenaga kerja juga dapat diartikan adalah orang yang bersedia atau sanggup bekerja untuk diri sendiri atau anggota keluarga yang tidak menerima upah serta mereka yang bekerja untuk upah. Sedangkan menurut pendapat Simanjuntak, bahwa tenaga kerja adalah kelompok penduduk dalam usia kerja, dimana ia mampu bekerja atau melakukan kegiatan ekonomis dalam menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dari definisi tersebut, dapat dipahami bahwa tenaga kerja merupakan kelompok orang-orang dari masyarakat yang mampu melakukan kegiatan serta mampu menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Secara fisik, kemampuan diukur dengan usia dengan kata lain orang yang dalam usia kerja disebut sebagai penduduk dalam usia kerja (*working age population*).

Tenaga kerja juga berarti tenaga kerja manusia, baik jasmani maupun rohani, yang digunakan dalam proses produksi, yang disebut juga sebagai sumber daya manusia. Tenaga kerja inilah yang menggarap sumber daya produksi alam. Manusia tidak hanya menggunakan tenaga jasmani, melainkan juga tenaga rohani. Tenaga kerja jasmani adalah tenaga kerja yang mengandalkan fisik atau jasmani dalam proses produksi. Sedangkan tenaga

³⁷ Devi Lestyasari, *Hubungan Upah Minimum Provinsi Dengan Jumlah Tenaga Kerja Formal Di Jawa Timur*, (Surabaya: Fakultas Ekonomi, Unesa) Tersedia Di: <http://jurnal.mahasiswa.unesa.ac.id/Article/5910/53/Article>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kerja rohani adalah tenaga kerja yang memerlukan pikiran untuk melakukan kegiatan proses produksi.³⁸

2. Kesempatan Kerja

Kesempatan kerja adalah banyaknya orang yang dapat tertampung untuk bekerja pada suatu instansi. Kesempatan kerja ini akan menampung semua tenaga kerja yang tersedia apabila lapangan pekerjaan yang tersedia mencukupi atau seimbang dengan banyaknya tenaga kerja yang tersedia. Kebijakan negara dalam kesempatan kerja meliputi upaya-upaya untuk mendorong pertumbuhan dan perluasan lapangan kerja di setiap daerah, serta perkembangan jumlah dan kualitas angkatan kerja yang tersedia agar dapat memanfaatkan seluruh potensi pembangunan di daerah masing-masing. Penciptaan kesempatan kerja adalah langkah yang tepat, mengingat penawaran tenaga kerja yang lebih tinggi dari permintaannya. Kelebihan tenaga kerja ini biasanya merupakan tenaga kerja tidak ahli, sehingga perlu kiranya perluasan investasi pada proyek-proyek padat karya, bukan pada perkembangan sektor kapitalis dengan ciri utama padat modal sebagai hasil dari pilihan strategi pembangunan yang mendahulukan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Kesempatan kerja mengandung pengertian bahwa besarnya kesediaan usaha produksi untuk mempekerjakan tenaga kerja yang dibutuhkan dalam proses produksi, yang dapat berarti lapangan pekerjaan atau kesempatan yang tersedia untuk bekerja yang ada dari saat kegiatan ekonomi.

Kesempatan kerja dapat tercipta apabila terjadi permintaan tenaga kerja

³⁸ Suroso, *Ekonomi Produksi*, (Bandung: Lubuk Agung 2004) h. 109

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di pasar kerja, sehingga dengan kata lain kesempatan kerja juga menunjukkan permintaan terhadap tenaga kerja. Kesempatan kerja menurut Tambunan, adalah termasuk lapangan pekerjaan yang sudah diduduki (employment) dan masih lowong. Dari lapangan pekerjaan yang masih lowong tersebut adanya kebutuhan berarti adanya kesempatan kerja bagi orang yang menganggur. Besarnya lapangan kerja yang masih lowong atau kebutuhan tenaga kerja yang secara riil dibutuhkan oleh suatu perusahaan tergantung pada banyak faktor, di antaranya yang paling utama adalah prospek usaha atau pertumbuhan output dari perusahaan tersebut, ongkos tenaga kerja atau gaji yang harus dibayar, dan harga faktor-faktor produksi lainnya yang bisa menggantikan fungsi tenaga kerja, misalnya barang modal. Perluasan kesempatan kerja produktif bukan berarti hanya menciptakan lapangan usaha baru. Melainkan pula usaha peningkatan produktivitas kerja yang pada umumnya disertai dengan pemberian upah yang sepadan dengan apa yang telah dikerjakan oleh setiap pekerja.

Pada dasarnya ada dua cara yang dapat ditempuh untuk memperluas kesempatan kerja:³⁹

- a. Pengembangan industri terutama padat karya yang dapat menyerap relatif banyak tenaga kerja dalam proses produksi; dan
- b. Melalui berbagai proyek pekerjaan umum seperti pembuatan jalan, saluran air, bendungan jembatan dan sebagainya.

³⁹ Moch Heru Anggoro, *Jurnal: Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Pertumbuhan Angkatan Kerja Terhadap Tingkat Pengangguran Di Kota Surabaya* (Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tenaga kerja yang berproduksi akan memperoleh balas jasa atau imbalan yang berupa upah/gaji, sehingga semakin banyak tenaga kerja yang berproduksi berarti akan semakin banyak warga masyarakat yang memperoleh penghasilan. Tetapi kenyataannya sering berbeda, dan inilah beban pemerintah dan masyarakat Indonesia dalam mengatasi tenaga kerja yang kompleks ini. Penyerapan tenaga kerja selain berkaitan dengan kebutuhan untuk memperoleh penghasilan bagi tenaga kerja, juga berkaitan dengan pendapatan nasional, sebab jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu bangsa akan mempengaruhi jumlah pendapatan nasionalnya. Semakin tinggi jumlah pendapatan nasional karena barang dan jasa, memungkinkan dilakukannya tabungan yang bisa untuk investasi.

Adanya investasi berarti akan memperbesar kebutuhan penyerapan tenaga kerja. Pendidikan merupakan salah satu faktor yang penting dalam pengembangan sumber daya manusia. Pendidikan tidak saja menambah pengetahuan, akan tetapi juga meningkatkan ketrampilan bekerja, dengan demikian meningkatkan produktivitas kerja dan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Penyelidikan mendukung pendapat bahwa negara-negara dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi juga mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Begitu juga halnya yang terjadi dalam industri kecil, pengusaha yang mempunyai tingkat pendidikan lebih tinggi akan lebih baik dalam produktivitas kerjanya dan juga dalam mengelola usaha, hal tersebut sesuai dengan teori human capital bahwa seseorang dapat meningkatkan penghasilannya melalui peningkatan pendidikan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Klasifikasi Tenaga Kerja

Klasifikasi adalah penyusunan bersistem atau berkelompok menurut standar yang di tentukan.⁴⁰ Maka, klasifikasi tenaga kerja adalah pengelompokan akan ketenaga kerjaan yang sudah tersusun berdasarkan kriteria yang sudah di tentukan yaitu:

a. Berdasarkan penduduknya

- 1) Tenaga kerja Tenaga kerja adalah seluruh jumlah penduduk yang dianggap dapat bekerja dan sanggup bekerja jika tidak ada permintaan kerja. Menurut Undang-undang Tenaga Kerja, mereka yang dikelompokkan sebagai tenaga kerja yaitu mereka yang berusia antara 15 tahun sampai dengan 64 tahun.
- 2) Bukan tenaga kerja Bukan tenaga kerja adalah mereka yang dianggap tidak mampu dan tidak mau bekerja, meskipun ada permintaan bekerja. Menurut Undang-undang Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2003, mereka adalah penduduk di luar usia, yaitu mereka yang berusia di bawah 15 tahun dan berusia di atas 64 tahun. Contoh kelompok ini adalah para pensiunan, para lansia (lanjut usia) dan anak-anak.

b. Berdasarkan batas kerja

- 1) Angkatan kerja Angkatan kerja adalah penduduk usia produktif yang berusia 15-64 tahun yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, maupun yang sedang aktif mencari pekerjaan.

⁴⁰ Pius Partanto, *Kamus Ilmiah Popular*, (Surabaya : Arkola, 2001) h. 345

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Bukan angkatan kerja Bukan angkatan kerja adalah mereka yang berumur 10 tahun ke atas yang kegiatannya hanya bersekolah, mengurus rumah tangga dan sebagainya. Contoh kelompok ini adalah: anak sekolah dan mahasiswa, para ibu rumah tangga dan orang cacat, dan para pengangguran sukarela.

Berdasarkan kualitasnya .

- 1) Tenaga kerja terdidik Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memiliki suatu keahlian atau kemahiran dalam bidang tertentu dengan cara sekolah atau pendidikan formal dan nonformal. Contohnya: pengacara, dokter, guru, dan lain-lain.
- 2) Tenaga kerja terlatih Tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu dengan melalui pengalaman kerja. Tenaga kerja terampil ini dibutuhkan latihan secara berulang-ulang sehingga mampu menguasai pekerjaan tersebut. Contohnya: apoteker, ahli bedah, mekanik, dan lain-lain.
- 3) Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih adalah tenaga kerja kasar yang hanya mengandalkan tenaga saja. Contoh: kuli, buruh angkut, pembantu rumah tangga, dan sebagainya.⁴¹

4. Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja

Setiap tenaga kerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan. Menurut Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 86 ayat 1, menyebutkan bahwa :

⁴¹ Dwiyanto Agus, *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2006). h. 45.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan

atas :

- a. keselamatan dan kesehatan kerja;
- b. moral dan kesusilaan; dan
- c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.”

Menurut Darwan Prints, yang dimaksud dengan hak di sini adalah sesuatu yang harus diberikan kepada seseorang sebagai akibat dari kedudukan atau status dari seseorang, sedangkan kewajiban adalah suatu prestasi baik berupa benda atau jasa yang harus dilakukan oleh seseorang karena kedudukan atau statusnya.⁴²

Mengenai hak-hak bagi pekerja adalah sebagai berikut :

- a. Hak mendapat upah atau gaji (Pasal 1602 KUH Perdata, Pasal 88 sampai dengan 97 Undang-undang No. 13 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah).
- b. Hak atas pekerjaan dan penghasilan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 4 Undang-undang No. 13 Tahun 2003).
- c. Hak bebas memilih dan pindah pekerjaan sesuai bakat dan kemampuannya (Pasal 5 Undang-undang No. 13 Tahun 2003).
- d. Hak atas pembinaan keahlian kejuruan untuk memperoleh serta menambah keahlian dan keterampilan lagi (Pasal 9- 30 Undang-undang No. 13 Tahun 2003).

⁴² Darwin Prinst. *Hukum Ketenaga Kerjaan Indonesia*.(Bandung : PT. Citra, 2000), h.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- e. Hak mendapatkan perlindungan atas keselamatan, kesehatan serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama (Pasal 3 Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek).
 - f. Hak mendirikan dan menjadi anggota Perserikatan Tenaga Kerja (Pasal 104 Undang-undang No. 13 Tahun 2003).
 - g. Hak atas istirahat tahunan, tiap-tiap kali setelah ia mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan berturut-turut pada satu majikan atau beberapa majikan dari satu organisasi majikan (Pasal 79 Undang-undang No. 13 Tahun 2003).
 - h. Hak atas upah penuh selama istirahat tahunan (Pasal 88-98 Undang-undang No. 13 Tahun 2003).
 - i. Hak atas suatu pembayaran tahunan, bila pada saat diputuskan hubungan kerja ia sudah mempunyai sedikitnya enam bulan terhitung dari saat ia berhak atas istirahat tahunan yang terakhir, yaitu dalam hal bila hubungan kerja diputuskan oleh majikan tanpa alasan-alasan mendesak yang diberikan oleh buruh, atau oleh buruh karena alasan-alasan mendesak yang diberikan oleh majikan (Pasal 50- 172 Undang-undang No. 13 Tahun 2003).
 - j. Hak untuk melakukan perundingan atau penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui bipartit, mediasi, konsiliasi, arbitrase dan penyelesaian melalui pengadilan (Pasal 6-115 Undang-undang No. 2 Tahun 2004)
- Dari sudut tenaga kerja, mempunyai hak serta kewajiban dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja dalam melakukan pekerjaan adalah :

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- a. Memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja.
- b. Memakai alat keselamatan kerja.
- c. Memenuhi dan menaati persyaratan keselamatan di tempat kerja.

Hak-hak tenaga kerja adalah :

- a. Meminta kepada pimpinan atau pengurus perusahaan tersebut agar dilaksanakan semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan di tempat kerja yang bersangkutan.
- b. Menyatakan keberatan melakukan pekerjaan bila syarat keselamatan dan kesehatan kerja serta alat perlindungan diri yang diwajibkan tidak memenuhi persyaratan, kecuali dalam batas-batas yang masih dapat dipertanggung jawabkan⁴³

C. Mekanisme Rekrutmen Tenaga Kerja PT. Jatim

Perencanaan Tenaga Kerja yang selanjutnya disingkat PTK, adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan. Rekrutmen tenaga kerja pada suatu perusahaan diatur di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa:⁴⁴

- 1) Dalam rangka pembangunan ketenagakerjaan, pemerintah menetapkan kebijakan dan menyusun perencanaan tenaga kerja.

⁴³ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005), h. 133-136.

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2) Perencanaan tenaga kerja meliputi :

- a. perencanaan tenaga kerja makro; dan
- b. perencanaan tenaga kerja mikro.

Kemudian Pasal 8 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan bahwa:⁴⁵

1) Perencanaan tenaga kerja disusun atas dasar informasi ketenagakerjaan yang

antara lain meliputi:

- a. penduduk dan tenaga kerja;
- b. kesempatan kerja;
- c. pelatihan kerja termasuk kompetensi kerja;
- d. produktivitas tenaga kerja;
- e. hubungan industrial;
- f. kondisi lingkungan kerja;
- g. pengupahan dan kesejahteraan tenaga kerja; dan
- h. jaminan sosial tenaga kerja.

2) Informasi ketenagakerjaan diperoleh dari semua pihak yang terkait, baik

instansi pemerintah maupun swasta.

Selanjutnya rekrutmen tenaga kerja diatur secara detail di dalam Peraturan

Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 08 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan

Ketenagakerjaan Pasal 11 menjelaskan bahwa perusahaan yang akan

mempekerjakan tenaga kerja dapat merekrut sendiri atau melalui pelaksanaan

penempatan tenaga kerja. Kemudian Pasal 19 menjelaskan bahwa perusahaan

⁴⁵ *Ibid.*,

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang membutuhkan tenaga kerja wajib menyampaikan informasi adanya lowongan pekerjaan secara tertulis kepada Dinas/Kantor yang menangani masalah ketenagakerjaan di Kabupaten Rokan Hilir.⁴⁶

Informasi lowongan pekerjaan sekurang-kurangnya memuat jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan; jenis pekerjaan; jabatan; syarat-syarat jabatan yang disolngkan dalam jenis kelamin, usia, pendidikan, keterampilan/keahlian, pengalaman kerja; batas waktu lowongan pekerjaan; jadwal proses penerimaan yang mencakup sosialisasi, seleksi administrasi, bakat dan minat, kemampuan, kesehatan, dan penandatanganan perjanjian kerja; gaji yang akan diterima; dan syarat-syarat lain yang diperlukan.

Dalam pengisian lowongan pekerjaan, pengusaha memprioritaskan penerimaan tenaga kerja lokal terutama pencari kerja yang telah terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hilir. Jumlah tenaga kerja yang diprioritaskan untuk tenaga kerja lokal sekurang-kurangnya 60 % (enam puluh persen) dari jumlah tenaga kerja yang diterima. Lowongan pekerjaan yang tidak dapat diisi oleh tenaga kerja lokal karena belum memenuhi persyaratan yang ditentukan, pengusaha dapat merekrut pencari kerja dari daerah lain baik dari dalam maupun luar propinsi.⁴⁷

PT. Jatim Jaya Perkasa (JJP) merupakan perusahaan yang modal sahamnya dimiliki oleh tiga orang, yaitu : Ganda 50%, Johanes 30%, dan Harino 20%.

⁴⁶ Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 08 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan

⁴⁷ *Ibid.*,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Adapun bentuk perusahaan ini adalah pengolahan kelapa sawit, dan menghasilkan minyak kelapa sawit setengah jadi.⁴⁸

Sistem rekrutmen tenaga kerja pada PT. Jatim berdasarkan wawancara penulis dengan Jeneral Meneger PT. Jatim menjelaskan bahwa Sistem rekrutmen tenaga kerja pada PT. Jatim diantaranya tidak pernah di publikasikan pembukaan lowongan pekerjaan yang dibutuhkan perusahaan, kemudian staff dan karyawan yang diterima bekerja pada PT. Jatim hanyalah orang terdekat/keluarga dari pimpinan perusahaan saja.⁴⁹

PT. Jatim Jaya Perkasa adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan sawit dan pabrik pengolahan sawit yang beroperasi di daerah Rokan Hilir, yang melakukan ekspor palm dan kernel oil ke berbagai negara, melalui pelabuhan Dumai. Pembangunan perkebunan dan pabrik pengolahan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT. Jatim Jaya Perkasa bertujuan untuk⁵⁰:

- a. Memanfaatkan sumberdaya lahan basah yang tersedia di Kabupaten Rokan Hilir sesuai dengan peruntukannya.
- b. Meningkatkan produktivitas lahan dalam jangka waktu yang cukup lama, dimana akan mencapai 25 tahun dan selanjutnya memberikan kontribusi terhadap peningkatan volume minyak sawit (CPO) dan inti sawit (PK), baik untuk kebutuhan dalam negeri maupun ekspor.
- c. Sebagai bentuk upaya partisipasi aktif dalam membantu pemerintah untuk meningkatkan investasi di Kabupaten Rokan Hilir tanpa mengabaikan keuntungan bagi perusahaan.

⁴⁸ Profil PT. Jatim

⁴⁹ Agus Damanik, (Jeneral Meneger PT. Jatim), *Wawancara*, Tanggal 16 Juni 2021

⁵⁰ Profil PT. Jatim

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- d. Membuka kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat sekitar lokasi kegiatan dan membantu pemerintah meningkatkan pendapatan asli daerah melalui setoran pajak.

Di samping itu kegiatan yang dilaksanakan memiliki kegunaan dan keperluan sebagai berikut⁵¹:

- a. Membantu pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam rangka pengembangan wilayah melalui program pembangunan perkebunan dan pabrik pengolahan kelapa sawit sesuai dengan wilayah komoditinya.
- b. Memenuhi kebutuhan pasar dalam dan luar negeri terhadap permintaan produk olahan kelapa sawit.
- c. Terwujudnya peran serta masyarakat, baik sebagai sumber tenaga kerja, mitra usaha, maupun sebagai objek pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat
- d. Memiliki kegunaan atau manfaat tidak langsung dalam memberi kontribusi terhadap pendapatan asli daerah.

Dengan berdirinya PT. Jatim Jaya Perkasa yang aktivitasnya membuka area baru yang jauh dari pemukiman penduduk, membawa perubahan diantaranya adanya minat penduduk untuk membuka lahan mereka yang berada di pinggir area HGU PT. Jatim Jaya Perkasa. Dan bagi penduduk yang mata pencahariannya berdagang, maka mereka akan berdagang barang kebutuhan harian ke perumahan-perumahan karyawan PT. Jatim Jaya Perkasa dengan menggunakan along-along (keranjang rotan). Untuk masyarakat yang mata

⁵¹ Ibid.,

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN er
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pencahariannya mencari ikan mereka menangkap ikan di kanal/parit yang ada di lokasi PT. Jatim Jaya Perkasa.

D. Tenaga Kerja Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.

Adapun yang dimaksud dengan Tenaga Kerja berdasarkan Pasal 1 ayat (8) Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.

Berkaitan dengan Tenaga Kerja Lokal Pasal 1 ayat (24) menjelaskan bahwa Tenaga Kerja Lokal adalah Tenaga Kerja yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Rokan Hilir. Sedangkan yang menjadi asas dan tujuan penyelenggaraan ketenagakerjaan adalah:

- 1) Asas penyelenggaraan ketenagakerjaan adalah terbuka, bebas, objektif, adil dan setara tanpa diskriminasi.
- 2) Tujuan penyelenggaraan ketenagakerjaan adalah :
 - a. Memberikan pelayanan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan baik dalam hubungan kerja maupun diluar hubungan kerja dan pemberi kerja dalam pengisian lowongan kerja sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan.
 - b. Mewujudkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi kerja agar mampu bersaing dalam pasar kerja; dan
 - c. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesejahteraan.

Kemudian berkaitan dengan jumlah penerimaan Tenaga Kerja Lokal Pasal 19 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 08 Tahun 2014 tentang Penyelegaraan Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa :

“Jumlah tenaga kerja yang diprioritaskan untuk tenaga kerja lokal sebagaimana ayat 3 (tiga) Pasal 19 sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) dari jumlah tenaga kerja yang diterima”.⁵²



UIN SUSKA RIAU

⁵² Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 08 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Pelaksanaan rekrutmen tenaga kerja lokal PT. Jatim berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan di Kecamatan Kubu Babusalam Kabupaten Rokan Hilir belum terlaksana dengan baik, karena tenaga kerja yang ada pada PT. Jatim mayoritas adalah tenaga kerja dari luar daerah. Padahal seharusnya tenaga kerja yang ada di PT. Jatim adalah sekurang-kurangnya 60% tenaga kerja lokal sesuai berdasarkan Peraturan Daerah tersebut.
- Faktor-faktor penghambat pelaksanaan rekrutmen tenaga kerja lokal PT. Jatim di Kecamatan Kubu Babusalam Kabupaten Rokan Hilir adalah diantaranya; (i) kurangnya kesadaran hukum; dan (ii) kurangnya kepedulian terhadap tenaga kerja lokal

B. Saran

Untuk terlaksananya pelaksanaan rekrutmen tenaga kerja lokal PT. Jatim berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan di Kecamatan Kubu Babusalam Kabupaten Rokan Hilir, maka setelah melakukan penelitian penulis mencoba memberikan beberapa saran yaitu :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. PT. Jatim diharapkan untuk meningkatkan rasa kesadaran hukum dan rasa kepeduliannya terhadap tenaga kerja lokal sebagaimana di atur di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan
2. Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir harus menindak tegas perusahaan-perusahaan yang tidak menjalankan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan bahwa jumlah tenaga kerja yang diprioritaskan untuk tenaga kerja lokal sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) dari jumlah tenaga kerja yang diterima. Untuk terciptanya jumlah tersebut Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dapat meningkatkan kualitas masyarakat tempatan sebagai penunjang dari permasalahan tersebut.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

A. Buku

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Midah, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dinamika dan Kajian Teori*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2010
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, 2011
- C.T. Kansil, *Pemerintahan Daerah di Indonesia Hukum Administrasi Daerah*, Jakarta, Sinar Grafika, 2000
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama ,Cetakan Empat, 2011
- Darwin Prinst. *Hukum Ketenaga Kerjaan Indonesia*, Bandung : PT. Citra, 2000
- Dwiyanto Agus, *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2006
- Irwan Soeharto, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2004
- Inu Kencana Syafie, *Ilmu Pemerintahan*, Jakarta, Bumi Aksara, 2013
- Juliansyah Noor, *Metode Peenelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Jakarta : Kencana Prenada Media Grub, 2011
- Joko Subagyo, *Metode penelitian dalam teori dan praktik*, Jakarta : Rineka Cipta, 2011
- Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005
- Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-Undangan*, Yogyakarta : Kanisius, 2007
- Nur Matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta : Rajawali Press,2011
- Rizali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Jakarta : Raja Grapindo, 2005
- Sugoso, *Ekonomi Produksi*, Bandung: Lubuk Agung 2004
- Swanto, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- Sendjun H Manululang, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*. Jakarta : PT Rineka Citra, 2008



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pius Partanto, *Kamus Ilmiah Popular*, Surabaya : Arkola, 2001

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:sinar Grafika, 2011

B. Jurnal

Devi Lestyasari, *Hubungan Upah Minimum Provinsi Dengan Jumlah Tenaga Kerja Formal Di Jawa Timur*, (Surabaya: Fakultas Ekonomi, Unesa) Tersedia Di: Jurnalmahasiswa.Unesa.Ac.Id/Article/5910/53/Article

Meich Heru Anggoro, *Jurnal: Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Pertumbuhan Angkatan Kerja Terhadap Tingkat Pengangguran Di Kota Surabaya* (Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya)

Subijanto, *Peran Negara Dalam Hubungan Tenaga Kerja Indonesia, Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*. (vol 17 no 6)

C. Internet

Www.Bps.Go.Id. Situs Resmi Badan Pusat Statistik

D. Peraturan Perundangan

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 08 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul

PELAKSANAAN REKRUTMEN TENAGA KERJA LOKAL PT. JATIM
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN
KETENAGAKERJAAN DI KECAMATAN KUBU BABUSALAM KABUPATEN
ROKAN HILIR " yang ditulis oleh :

Nama : EFFENDI
NIM : 11627104039
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 28 Juli 2021
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Daring / Online

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas
Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 29 Juli 2021

TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Darmawan Tia Indrajaaya, M.Ag

Setretaris
Jani Alizon, SH., MH

Penguji I
Nurhidayat, SH., MH

Penguji II
Syafrialdi, SH., MH

Mengetahui:

Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalikus, S.Ag.

NIP. 19750801 200701 1 023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 03 Februari 2021

: UIN/04/F.I/PP.00.9/1658/2021

: Bahasa

: 1 (Satu) Proposal

: Mohon Izin Riset

Kepada

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	: EFENDI
NIM	: 11627104039
Jurusan	: Ilmu Hukum S1
Semester	: IX (Sembilan)
Lokasi	: PT. Jatim Rokan Hilir

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Pelaksanaan Rekrutmen Tenaga Kerja Lokal Mandat PT. Jatim Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan Di Kecamatan Kubu Babusalam Kabupaten Rokan Hilir

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

Rector
Dekan
Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag.
NIP. 19580712 198603 1 005

Tembusan :
Rector UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/39793
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 103/PP.019/1658/2021 Tanggal 3 Februari 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama	: EFENDI
2. NIM / KTP	: 11627104039
3. Program Studi	: ILMU HUKUM
4. Jurusan	: S1
5. Alamat	: PEKANBARU
6. Judul Penelitian	: PELAKSANAAN REKRUTMEN TENAGA KERJA LOKAL MANDAT PT. JATIM BERDASARAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGARAAN KETENAGAKERJAAN DI KECAMATAN KUBU BABUSALAM KABUPATEN ROKAN HILIR
7. Lokasi Penelitian	: PT. JATIM ROKAN HILIR

dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 18 Maret 2021



Disandatangani Secara Elektronik Melalui :
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU**

UIN SUSKA RIAU

Penyampaian :
 disampaikan kepada Yth :
 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
 Bupati Rokan Hilir
 Up. Kabag. Kesbangpol dan Linmas di Bagansiapiapi
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
 Yang Berhormat

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN KECAMATAN BATU EMPAT TELP. (0767) 22113 FAX. (0767) 22113
BAGANSIAPAPI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diarung mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Diarung mengutipkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

0767/Kesbangpol/2021/66

Biasa

Rekomendasi Riset

Bagansiapiapi, 15 April 2021

Kepada Yth.
Direktur PT. Jatim Rokan Hilir
Kabupaten Rokan Hilir
di-

Tempat

Membaca Surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/39793 tanggal 18 Maret 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset dan Pengumpulan Data untuk Bahan Skripsi, dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

1. Nama : EFENDI
2. NIM / KTP : 11627104039
3. Program Studi : ILMU HUKUM
4. Jenjang : S1
5. Alamat : PEKANBARU
6. Judul : PELAKSANAAN REKRUTMEN TENAGA KERJA LOKAL MANDAT PT. JATIM BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGARAAN KETENAGA KERJAAN DI KECAMATAN KUBU BABUSSALAM KABUPATEN ROKAN HILIR
7. Lokasi : PT. JATIM ROKAN HILIR

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dalam proposal yang tidak sesuai/ tidak ada kaitannya dengan Penelitian dimaksud.
2. Pelaksanaan Penelitian berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung Tanggal dibuatnya surat ini hingga selesai.
3. Galangan Hasil Riset agar disampaikan pada Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Rokan Hilir.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya dan kepada pihak yang terkait dapat memberikan kemudahan kelancaran kegiatan ini.

UIN SUSKA RIAU

PIL KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN ROKAN HILIR



FADLI, SH, M.Si
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19750811 200012 1 004

Tembusan Kepada Yth:

1. Dekan Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
2. Yang Bersangkutan



SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:


: EFENDI
: 11627104039
: ILMU HUKUM
: PELAKSANAAN REKRUTMEN TENAGA KERJA LOKAL PT. JATIM BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN DI KECAMATAN KUBU BABUSALAM KABUPATEN ROKAN HILIR

Pembimbing : Ilham Akbar, S.HI., S.H., M.H

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru 29 Juli 2021

An. Pimpinan Redaksi


M. Alpi Syahrin, SH., MH., CPL
NIP. 198804302019031010

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



BIOGRAFI PENULIS

Penulis bernama Efendii, lahir di Rpkn Hilir pada tanggal 01 Oktober 1996. Anak kelima dari lima bersaudara. Lahir dari buah hati Ayahanda Ibrahim Na'im dan Ibunda Syamsiyah. Penulis memiliki empat orang adik yang bernama Abdul Gani, Azmi, Jasmiati, Uliyadi, Abu Khoiri. Pendidikan yang dilalui penulis adalah Sekolah Dasar Negeri 009 Rokan Hilir pada tahun 2004 sampai 2010. Setelah itu penulis melanjutkan ke sekolah MTs Al Wasliah Rokan Hilir Kecamatan Kubu Babussalam dari tahun 2010 sampai dengan 2013.

Kemudian penulis melanjutkan ke sekolah SMA Negeri 1 Kubu Babussalam dari tahun 2013 sampai 2016. Setelah itu penulis melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi di UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Ilmu Hukum dan gelar sarjana telah didapatkan dan dinyatakan LULUS pada hari rabu 28 Juli 2021 dan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (SH). Penulis menyelesaikan Studi S1 dengan judul "PELAKSANAAN REKRUTMEN TENAGA KERJA LOKAL PT. JATIM BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN DI KECAMATAN KUBU BABUSALAM KABUPATEN ROKAN HILIR". Penulis dalam melakukan penulisan dibimbing oleh Dosen Pembimbing yakni Bapak Ilham Akbar, SHI., SH MA

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.